MUSYTARI
ISSN: 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 10 no. 6 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PENERAPAN PRINSIP-PEINSIP DASAR KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN GRUP DI INDONESIA: STUDI PERBANDINGAN PSAK DNN *IFRS*

Lely Afemelia Bisri[1], Afifah[2], Khusni Mubarok[3], M. Masrukhan[4]
[1,2,3,4]Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Akuntansi Syariah
UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
[1]lelyafemelia@gmail.com, [2]fifahafifah405@gmail.com, [3]husnimubarok110803@gmail.com
[4]masrukhan8909@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the application of the basic principles of financial statement consolidation in group companies that use PSAK standards and compare them to IFRS standards. PSAK is an accounting standard used in Indonesia, inverti firm that in the preparation of consolidated financial statements guiding for companies, especially those that have subsidiaries or part of a group company to understand the principles, application of PSAK and differences from IFRS in the preparation of consolidation, such as recognition of ownership, acquisition method, remeasurement to fair value and disclosure of subsidiaries and associated entities. The description section concludes this research. The descriptive quantitative method and case studies of more than one dozen issuers on the Indonesia Stock Exchange show that since the enactment of PSAK has adopted most of IFRS, there are some differences owned by PSAK that affect the consistency and success of inter-company impromptu financial statements. Therefore, reference to this research is suggested so that companies in Indonesia better understand the application of PSAK and its implications, and help state authorities and policy makers to improve the cohesiveness of national accounting standards with IFRS.

Keywords: *Financial Statement Consolidation, PSAK, IFRS, Group Companies, Indonesian Accounting Standards.*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis tentang penerapan prinsip-prinsip dasar konsolidasi laporan keuangan pada perusahaan grup yang menggunakan standar PSAK dan membandingkannya pada standar *IFRS*. PSAK adalah standar akuntansi yang digunakan di Indonesia, inverti firma bahwasanya dalam penyusunan pembuatan laporan keuangan konsolidasian yang membimbing bagi perusahaan-perusahaan terutama yang memiliki anak perusahaan ataupun bagian dari perusahaan grup usaha untuk memahami prinsip, penerapan PSAK dan perbedaan dari *IFRS* dalam pembuatan konsolidasi, seperti pengakuan

Article History
Received: November 2024
*Review*ed: November 2024
Published: November 2024

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Musytari

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 10 no. 6 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

kepemilikan, metode akuisisi, pengukuran kembali ke nilai wajar serta pengungkapan entitas anak-anak dan entitas asosaasi. Bagian deskripsi menyimpulkan penelitian ini. Metode kuantitatif deskriptif dan studi kasus dari lebih dari satu puluh emiten di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya PSAK telah mengadopsi sebagian besar *IFRS*, terdapat beberapa perbedaan yang dimiliki oleh PSAK yang mempengaruhi konsistensi dan keberhasilan laporan keuangan keuangan antar-perusahaan dadakan. Oleh karena itu, referensi penelitian ini disarankan agar perusahaan di Indonesia lebih memahami penerapan PSAK dan implikasinya, dan membantu penguasa negara dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan kohesifitas standar akuntansi nasional dengan *IFRS*.
Kata Kunci: Konsolidasi Laporan Keuangan, PSAK, *IFRS*, Perusahaan Grup, Standar Akuntansi Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan global, perusahaan sering kali memilih untuk berkembang dengan menggabungkan entitas lain atau membentuk grup perusahaan guna memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memaksimalkan nilai perusahaan. Konsolidasi laporan keuangan menjadi penting dalam konteks ini karena memungkinkan perusahaan grup untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja keuangan mereka sebagai entitas yang terintegrasi. Laporan keuangan yang terkonsolidasi menyatukan data dari induk perusahaan dan anak perusahaan, memberikan pemangku kepentingan pandangan yang lebih holistik mengenai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban perusahaan secara keseluruhan.

Di Indonesia, penyusunan laporan keuangan perusahaan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK sendiri telah mengalami banyak perubahan dan penyesuaian dalam upaya untuk harmonisasi dengan standar internasional, yaitu *International Financial Reporting Standards* (*IFRS*). *IFRS* adalah standar akuntansi yang disusun oleh International Accounting Standards Board (IASB) dan bertujuan untuk mencapai keseragaman pelaporan keuangan di seluruh dunia, sehingga memungkinkan perbandingan yang lebih mudah antara entitas bisnis di berbagai negara.

Dalam konteks konsolidasi laporan keuangan, penerapan PSAK di Indonesia masih mengikuti prinsip-prinsip yang ada dalam *IFRS*, namun terdapat beberapa perbedaan signifikan yang dapat mempengaruhi penyusunan dan pelaporan. Misalnya, *IFRS* memiliki aturan yang lebih spesifik dan rinci dalam hal pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas dalam konsolidasi, sedangkan PSAK sering kali memberikan fleksibilitas dalam beberapa aspek tertentu agar sesuai dengan kondisi lokal.

Artikel ini akan membahas penerapan prinsip-prinsip dasar konsolidasi laporan keuangan pada perusahaan grup di Indonesia dengan fokus pada studi perbandingan antara PSAK dan *IFRS*. Beberapa aspek utama yang akan diulas meliputi konsep pengendalian, metode konsolidasi, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas, hingga implikasi pelaporan yang timbul dari perbedaan kedua standar tersebut. Diharapkan, artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pembaca, terutama praktisi akuntansi, regulator, dan

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 10 no. 6 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

akademisi, mengenai bagaimana standar yang berbeda ini diterapkan dalam konteks Indonesia serta dampaknya terhadap kualitas dan keterbandingan laporan keuangan di tingkat global.

Penelitian mengenai perbandingan PSAK dan *IFRS* dalam konsolidasi laporan keuangan penting dilakukan mengingat semakin banyak perusahaan Indonesia yang memiliki afiliasi dengan perusahaan multinasional. Sebagai bagian dari upaya integrasi dengan pasar global, pelaporan keuangan yang sejalan dengan standar internasional akan membantu meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor asing terhadap perusahaan Indonesia. Di sisi lain, perusahaan yang hanya beroperasi di Indonesia mungkin memiliki keterbatasan atau tidak diwajibkan untuk mengikuti *IFRS* sepenuhnya, sehingga pemahaman akan perbedaan antara PSAK dan *IFRS* menjadi penting agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan pelaporan perusahaan.

Selain itu, perbedaan dalam standar ini juga berpotensi menimbulkan permasalahan dalam hal konsistensi dan keterbandingan laporan keuangan antar perusahaan. Standar akuntansi yang berbeda dapat mempengaruhi angka-angka yang dilaporkan, yang pada akhirnya berdampak pada penilaian kinerja dan nilai perusahaan. Sebagai contoh, perbedaan dalam metode pengakuan aset atau liabilitas dapat mengakibatkan perbedaan signifikan dalam nilai total aset atau ekuitas yang dilaporkan, yang kemudian mempengaruhi rasio keuangan dan interpretasi kinerja perusahaan.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip dasar konsolidasi laporan keuangan pada perusahaan grup di Indonesia dengan membandingkan antara Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) dan *International Financial Reporting Standards* (*IFRS*)

Dengan demikian, studi ini tidak hanya relevan bagi perusahaan yang beroperasi di lingkungan internasional, tetapi juga bagi otoritas regulasi di Indonesia dalam mengevaluasi apakah harmonisasi PSAK dengan *IFRS* sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pengguna laporan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Prinsip Konsolidasi Laporan Keuangan

Menurut IAI dalam PSAK No. 4, laporan keuangan konsolidasian merupakan laporan keuangan gabungan dari sekelompok perusahaan yang tersaji secara tunggal sebagai satu kesatuan ekonomi. Dapat disimpulkan jika laporan keuangan konsolidasi dibutuhkan ketika salah satu entitas anggota memiliki pengendalian atas entitas lainnya atau jika salah satu entitas tidak memiliki pengendalian atas entitas lainnya, maka tidak diperlukan laporan keuangan konsolidasi. Dengan demikian, apabila tidak memiliki pengendalian, Artinya, perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan yang terpisah, dalam arti setiap perusahaan mengelola keuangannya sendiri dan bukan merupakan satu kesatuan.

Laporan keuangan konsolidasi mengacu pada IAS 27, merupakan laporan keuangan dari sebuah grup perusahaan secara keseluruhan yang tersaji sebagai kesatuan usaha. Dari perspektif regulasi, entitas induk dan entitas anak bersifat independen. Namun, berdasarkan perspektif bisnis, entitas anak hanyalah perpanjangan tangan dari entitas induk, karena seluruh keputusan bisnisnya ditetapkan oleh entitas induk. Dari perspektif ekonomi, kedua perusahaan membentuk satu kesatuan ekonomi. Dalam rangka membentuk satu kesatuan ekonomi, maka kedua entitas tersebut harus menyajikan laporan keuangan yang meliputi dan merefleksikan kegiatan usaha kedua entitas tersebut. Pernyataan keuangan tersebut disebut sebagai laporan keuangan konsolidasi.

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 10 no. 6 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Pada hakikatnya, laporan keuangan konsolidasi merupakan pernyataan yang diadopsi yang mempertimbangkan signifikansi ekonomi suatu perusahaan. Dari sudut pandang hukum, perusahaan induk dan anak perusahaan adalah kesatuan yang terpisah, dan hukum antimonopoli juga mengharuskan transaksi antara afiliasi dilakukan dengan cara yang wajar. Hal ini berarti bahwa perusahaan induk tidak diizinkan untuk membedakan tingkat harga penjualan produknya kepada anak perusahaan dan perusahaan lain yang tidak terafiliasi, atau melakukan pembelian dengan harga yang berbeda dari perusahaan lain yang tidak terafiliasi. Laporan keuangan konsolidasi harus menunjukkan esensi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Jika seluruh atau sebagian suara PT A dipegang oleh PT B, apakah itu berarti bahwa PT B dipegang oleh PT A? Atau, sekali lagi, bahwa PT PT A adalah PT B.

IAI dalam PSAK No. 4 menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasian yang disajikan oleh entitas induk dimaksudkan untuk tersedianya informasi bagi para pengguna laporan keuangan mengenai informasi keuangan suatu kelompok usaha yang mana kelompok usaha tersebut merupakan suatu kesatuan usaha yang terpisah.

PSAK 4 menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai kendali atas perusahaan lain harus membuat laporan keuangan konsolidasian. Induk perusahaan tidak lagi diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan tersendiri (jika tidak ada laporan keuangan konsolidasian) ketika melakukan pengendalian atas anak perusahaan, sebab hanya terdapat satu set laporan keuangan bertujuan umum, yaitu laporan keuangan konsolidasian, untuk entitas tersebut. Namun demikian, PSAK 4 memperbolehkan perusahaan induk untuk menyusun laporan keuangan tersendiri (laporan terpisah) sesuai dengan batasan yang ditentukan untuk memberikan informasi tambahan. Pada kasus seperti ini, laporan keuangan konsolidasian masih perlu disajikan, sedangkan laporan keuangan tersendiri dipergunakan untuk memberikan informasi tambahan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 4, perubahan 2009, investasi pada entitas anak diakui sebesar biaya perolehan atau sesuai dengan PSAK 55, yang mengatur tentang instrumen keuangan. Proses pengakuan dan pengukurannya adalah sebagai berikut: Berdasarkan metode biaya, investasi diukur sebesar biaya perolehan, sehingga perubahan nilai investasi pada entitas anak tidak diakui. Sebaliknya, peraturan sebelumnya (PSAK 4 tahun 1994) mengijinkan perusahaan induk untuk mengakui investasi secara terpisah dengan menggunakan metode ekuitas.

Proses konsolidasi merujuk pada langkah-langkah yang diambil dalam penggabungan laporan keuangan anak perusahaan dengan laporan keuangan perusahaan induk. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akuntansi konsolidasi dan menjamin adanya laporan keuangan gabungan yang menyajikan informasi yang benar dan utuh mengenai performa dan kondisi keuangan dari keseluruhan grup perusahaan.

Proses konsolidasi dijelaskan di bawah ini:

1) Mengidentifikasi anak perusahaan dan perusahaan induk:
   Tahap konsolidasi diawali degan identifikasi anak perusahaan dan perusahaan induk. Anak perusahaan merupakan perusahaan yang dikendalikan melalui perusahaan induk.
2) Menentukan metode konsolidasi:
   Dalam tahapan selanjutnya, perusahaan pengendali menetapkan metode konsolidasi yang ingin diterapkan. Bergantung pada tingkat pengendalian oleh perusahaan induk, ini dapat berupa konsolidasi penuh, konsolidasi proporsional atau metode ekuitas.
3) Penerimaan laporan keuangan tahunan entitas anak:
   Laporan keuangan anak perusahaan, termasuk neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas, diakui oleh anak perusahaan. Laporan keuangan ini digunakan dalam proses konsolidasi.

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 10 no. 6 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

4) Menyesuaikan nilai aset dan kewajiban:
Mungkin perlu dilakukan pengukuran atas nilai aset dan kewajiban pada laporan keuangan anak perusahaan agar sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan induk. Penyesuaian ini dapat mencakup amortisasi *goodwill* atau penyesuaian nilai wajar.
5) Mengeliminasi operasi antar perusahaan:
Semua transaksi antar perusahaan antara anak perusahaan dan perusahaan induk, termasuk penjualan atau pembelian yang dilakukan antar perusahaan, akan dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasian guna menghindari duplikasi pendapatan dan beban.
6) Mengakui *goodwill* atau kerugian investasi:
Apabila anak perusahaan diakuisisi melebihi nilai wajar aset dan liabilitas bersihnya, diakui adanya *goodwill*. Akan tetapi, apabila nilai yang dikeluarkan kurang dari nilai wajar, maka kerugian investasi diakui.
7) Pengakuan kepentingan nonpengendali:
Apabila perusahaan induk tidak mempunyai kontrol secara penuh atas entitas anak, maka kepentingan non-pengendali akan diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.
8) Menyesuaikan pendapatan serta beban pajak:
Pendapatan dan beban pajak perusahaan-perusahaan dalam grup harus disesuaikan sehingga mencerminkan kondisi yang terjadi sebenarnya guna menjamin bahwa neraca pajak konsolidasi sudah akurat.
9) Menyusun laporan keuangan konsolidasi:
Begitu seluruh penyesuaian dan eliminasi selesai dilakukan, induk perusahaan bertugas menyiapkan laporan keuangan konsolidasi, yang meliputi neraca konsolidasi, laporan laba rugi konsolidasi, dan laporan arus kas konsolidasi.
10) Dalam proses konsolidasi, tim keuangan dan akuntansi harus saling bekerja sama untuk memastikan bahwa semua transaksi dan kejadian yang material telah dicerminkan secara akurat dalam laporan keuangan konsolidasi. Hal ini penting untuk menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan perusahaan.m

PSAK dan *IFRS* Terkait Konsolidasi

Pernyataan Standar Akuntansi keuangan No. 65 (Laporan keuangan Kosolidasian)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 65 mengikuti prinsip pengendalian dan bukan prinsip kepemilikan, yaitu bahwa konsolidasi terjadi ketika adanya suatu pengendalian. Konsolidasi terjadi ketika terdapat pengendalian, adalah kewenangan untuk mengendalikan kebijakan operasi dan keuangan suatu organisasi dalam rangka memperoleh manfaat dari operasinya. Ketika seseorang memiliki kewenangan untuk mengarahkan keuangan dan operasi organisasi untuk mendapatkan hasil dari operasinya, orang tersebut dikatakan memiliki pengendalian. Pengendalian adalah memiliki lebih dari 50% hak suara perusahaan.

PSAK 65 yang diperbaharui tahun 2013: Laporan Keuangan Tersendiri, yang merupakan versi terbaru dari PSAK 4 tahun 2009, menjadi dasar konsolidasi di Indonesia. Bagian Laporan Keuangan Tersendiri dari PSAK 4 yang diperbaharui tahun 2013 menyajikan Laporan Keuangan konsolidasi

PSAK No.65 diadopsi dari IRFS 10 didalamnya diatur mengenai prinsip utama dalam penyusunan Laporan Keuangan konsolidasi, berikut ini merupakan prinsip prinsip utama yang diatur PASK No.65:

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 10 no. 6 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

1. Pengendalian

Menurut PSAK No. 65, suatu entitas dianggap memiliki pengendalian atas entitas lain jika memenuhi tiga kriteria berikut: entitas memiliki kekuasaan atas bagiannya, terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel yang terkait dengan bagiannya, dan memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaan atas bagiannya untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut. Pengawasan atas entitas anak oleh entitas induk merupakan dasar penting dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

2. Pengakuan *Goodwill*

Mengacu pada PSAK No. 65, ketika perusahaan induk mengakuisisi anak perusahaan, nilai yang berbeda antara harga akuisisi dan nilai wajar aset bersih anak perusahaan yang diakuisisi dianggap sebagai *goodwill*. *Goodwill* merupakan nilai tambah yang tidak dapat dikurangkan dari aset bersih entitas anak dan hanya tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. *Goodwill* disusutkan secara berkelanjutan untuk mencerminkan nilai kininya.

3. Metode Konsolidasi

Laporan keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan menggunakan model konsolidasi penuh sesuai dengan PSAK No. 65. Dengan menggunakan metodologi ini, laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara komprehensif aset, piutang, pendapatan dan beban anak perusahaan. Untuk memastikan bahwa laporan keuangan konsolidasian mencakup data yang secara akurat menggambarkan aset bersih, posisi keuangan dan hasil usaha Grup secara keseluruhan, seluruh transaksi intra-grup, termasuk piutang dan utang antar perusahaan, dieliminasi.

4. Pengungkapan Kepentingan Non-Pengendali (NCI)

Kebijakan PSAK No. 65 menetapkan adanya kepentingan non pengendali, yang merupakan bagian dari ekuitas anak perusahaan yang bukan merupakan bagian dari entitas induk, untuk diukur dalam laporan keuangan konsolidasian. Kepentingan nonpengendali bisa dihitung pada nilai wajar atau sebesar bagian kepentingan non pengendali terhadap aset bersih entitas anak. Kepentingan nonpengendali dicatat dalam neraca konsolidasian yang merupakan bagian yang dipisahkan dari ekuitas dan menggambarkan proporsi kepemilikan nonpengendali pada anak perusahaan.

IFRS 10 (Consolidated Financial Statements)

Menurut *IFRS* 10, suatu entitas dianggap mempunyai pengendalian atas perusahaan lain jika memenuhi tiga kriteria: Entitas tersebut memiliki kekuasaan atas entitas yang bersangkutan, terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil yang bervariasi, dan mempunyai kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas entitas tersebut guna menentukan imbal hasil tersebut. Dengan prinsip ini, perusahaan hanya melakukan konsolidasi atas perusahaan yang benar-benar memiliki kendali.

Ketika sebuah perusahaan mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain, standar *IFRS* 10 untuk penyusunan konsolidasi keuangan berlaku. Menurut *IFRS* 10, perusahaan induk yang memiliki satu atau lebih anak perusahaan harus menyusun laporan keuangan konsolidasi. Standar ini menetapkan prinsip pengendalian dan menjadi dasar konsolidasi. Standar ini merinci aturan akuntansi untuk penyusunan neraca konsolidasi. Standar ini menetapkan entitas investasi dan menetapkan modifikasi yang diperlukan untuk mengkonsolidasikan entitas anak tertentu dari entitas investasi tersebut. Selain itu, ini menjelaskan bagaimana menerapkan prinsip contrôle untuk menentukan apakah satu investor memiliki kendali atas investor lain dan oleh karena itu harus mengkonsolidasikan yang terakhir.

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 10 no. 6 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

IFRS 10 (Standar Pelaporan Keuangan Internasional 10) menetapkan prinsip-prinsip dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk perusahaan yang memiliki kendali atas perusahaan lain. Prinsip-prinsip terpenting yang ditetapkan dalam *IFRS* 10 dijelaskan di bawah ini:

1. Pengendalian

   Investor dapat mempertahankan kendali atas uang mereka sendiri, menyesuaikan diri dengan perubahan imbal hasil investasi mereka, dan mempertahankan kendali atas imbal hasil tersebut di bawah *IFRS* 10. Singkatnya, sebuah organisasi dianggap memiliki kendali ketika memenuhi tiga persyaratan mendasar yaitu memiliki beragam pendapatan, memiliki pengaruh terhadap investor, dan memiliki kemampuan untuk menggunakan pengaruh tersebut untuk mengubah pendapatan tersebut. Penyajian neraca konsolidasi hanya dapat dilakukan setelah memenuhi ketiga persyaratan tersebut.

2 Penyertaan *goodwill*

   Sebagai bagian dari langkah konsolidasi, *IFRS* 10 mengatur bahwa *goodwill* perlu diakui apabila ada perbedaan antara nilai imbalan yang dialihkan dengan nilai wajar aset neto perusahaan yang diakuisisi. *Goodwill* adalah aset tidak berwujud yang menggambarkan peningkatan nilai perusahaan yang diakuisisi sehubungan dengan aset bersihnya. *Goodwill* hanya diakui dalam laporan keuangan konsolidasian dan tidak muncul dalam laporan keuangan individual perusahaan induk.

3. Metode konsolidasi

   IFRS 10 menentukan metode konsolidasi penuh untuk kombinasi laporan keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan. Dengan cara ini, seluruh aset, kewajiban, pendapatan serta beban atas anak perusahaan dicatat secara keseluruhan dalam laporan keuangan induk perusahaan, yang mana mengeliminasi transaksi-transaksi antar perusahaan dalam Grup. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin agar penyajian informasi dalam laporan keuangan konsolidasian mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha Grup secara keseluruhan.

4. Pengungkapan kepentingan nonpengendali (KNP)

   Kepentingan nonpengendali - kepentingan dalam usaha lain dimana entitas induk tidak memiliki pengendalian - harus disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan *IFRS* 10. Kepentingan nonpengendali dapat dicatat pada nilai yang pasti atau sebagai persentase dari aset bersih entitas anak, sesuai dengan aturan akuntansi Grup. Hak atas kepentingan nonpengendali diperlakukan sebagai aset yang terpisah dari modal perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasian.

METODE

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan dan menganalisis penggunaan konsep konsolidasi dalam PSAK dan *IFRS* melalui metode analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, digunakan laporan keuangan dari perusahaan grup yang terdaftar di BEI, PSAK, *IFRS*, dan publikasi penelitian terbaru. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perbandingan antara PSAK dan *IFRS* dalam neraca konsolidasi.

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 10 no. 6 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Konsolidasi di Perusahaan Grup di Indonesia

PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) merupakan termasuk kedalam perusahaan agribisnis terbesar di Indonesia yang berfokus pada sektor kelapa sawit. Anak perusahaan dari PT Astra International Tbk, perusahaan ini memiliki portofolio yang mencakup seluruh rantai nilai industri sawit, mulai dari budidaya perkebunan, pengolahan, hingga distribusi produk kelapa sawit. Dengan perkebunan yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, Astra Agro Lestari mengelola area perkebunan yang luas dan memiliki berbagai anak perusahaan yang mendukung kegiatan operasional utamanya. Dalam penerapan laporan keuangan konsolidasi, Astra Agro Lestari mengikuti PSAK 65, menggabungkan seluruh aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban dari anak perusahaan yang berada di bawah kendalinya. Setiap transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi untuk menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang mencerminkan posisi keuangan dan kinerja grup secara utuh, sesuai standar akuntansi di Indonesia.

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Arus kas diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dalam laporan arus kas konsolidasian PT Agro Lestari Tbk. yang disajikan dengan menggunakan metode langsung. Aturan akuntansi keuangan di Indonesia, yang mengharuskan manajemen untuk menggunakan estimasi dan asumsi untuk menilai aset, liabilitas dan mengungkapkan risiko yang mungkin terjadi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian, harus diperhatikan dalam penyusunan laporan ini. Walaupun hasil aktual mungkin berbeda dengan estimasi ini, estimasi ini juga berdampak pada pengakuan pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Perusahaan dan anak perusahaan menggunakan mata uang rupiah sebagai mata uang fungsional, dan semua angka-angka statistik yang disajikan dalam laporan ini dibulatkan ke dalam jutaan rupiah terdekat, kecuali dinyatakan lain.

Prinsip-Prinsip Konsolidasi

Laporan arus kas konsolidasian PT Agro Lestari Tbk mengklasifikasikan aktivitas operasi, investasi dan keuangan. direpresentasikan dengan menggunakan proses langsung. Di Indonesia, peraturan akuntansi keuangan mengharuskan manajemen untuk menggunakan estimasi dan asumsi untuk menilai aset, liabilitas dan mengidentifikasi potensi risiko dalam konsolidasi ekonomi. Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini ketika membuat formulir ini. Meskipun hasil aktual mungkin berbeda dari perhitungan ini, namun hal ini juga berdampak pada penentuan pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Perusahaan dan anak perusahaan beroperasi dalam mata uang rupiah, dan semua angka yang disajikan dalam laporan ini telah disetahunkan ke dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Selain itu, laporan keuangan menunjukkan bahwa kepentingan nonpengendali tidak sepenuhnya disajikan dalam laba/rugi, melainkan disajikan dalam pendapatan dan penghasilan lainnya. Lebih lanjut, kepentingan nonpengendali diakui dalam laba bersih anak perusahaan segera setelah tanggal kombinasi, sejalan dengan perubahan saham anak perusahaan, dan sebagai sarana untuk mempromosikan kesatuan yang lebih besar dalam sistem keuangan.

Neraca laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak awal pengawasan menunjukkan hasil operasi perusahaan selama masa pengawasan. Neraca laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian perusahaan mencakup kinerja perusahaan selama fase manajemen, meskipun fase manajemen berakhir pada periode yang sama.

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 10 no. 6 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian menunjukkan pentingnya konsistensi dalam pelaporan yang material di seluruh entitas anak. Konsistensi ini mencakup penerapan metode akuntansi seragam yang memastikan bahwa laporan konsolidasian mencerminkan kondisi keuangan dan hasil usaha secara tepat. Untuk menghindari adanya penggandaan informasi dalam pelaporan, semua transaksi serta saldo yang material antara perusahaan yang dikonsolidasikan dieliminasi. Langkah ini penting untuk menjaga integritas laporan keuangan dengan hanya menampilkan informasi yang relevan dan mencegah kesalahan interpretasi atas hasil usaha dan posisi keuangan gabungan.

Dalam konteks akuisisi, *goodwill* diakui sebagai selisih antara harga perolehan investasi dan proporsi nilai wajar aset bersih entitas anak yang diperoleh pada tanggal akuisisi. *Goodwill* ini mencerminkan potensi keuntungan di masa depan yang berasal dari aset tidak teridentifikasi seperti reputasi atau hubungan pelanggan yang baik. *Goodwill* tidak diamortisasi, tetapi diuji penurunan nilainya secara tahunan untuk memastikan nilai yang tercatat tetap mencerminkan manfaat ekonomi aktual yang dihasilkan.

Restrukturisasi antar entitas sepengendali, yaitu restrukturisasi di antara entitas yang dikendalikan oleh perusahaan induk yang sama, dicatat menggunakan metode yang menyerupai metode penyatuan kepemilikan. Dalam metode ini, selisih antara nilai perolehan investasi dan nilai buku aset bersih entitas yang diakuisisi dicatat sebagai tambahan modal disetor, yang berada dalam bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih realistis tentang ekuitas perusahaan induk setelah restrukturisasi.

Selain itu, ventura bersama yaitu entitas yang dikendalikan bersama dengan satu atau lebih pihak lain diperlakukan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ini, perusahaan induk mengakui proporsi kepemilikan dan laba/rugi dari ventura bersama tersebut sebagai bagian dari pendapatan investasi. Ini memastikan bahwa laporan keuangan konsolidasian mencerminkan pengaruh keuangan dari ventura bersama tanpa memasukkan hasil operasional secara langsung ke dalam laporan laba rugi.

Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif mengenai posisi keuangan gabungan serta kinerja operasi perusahaan, sambil mempertimbangkan transaksi antar entitas, kepemilikan *goodwill*, dan kemitraan dalam ventura bersama.

Perbandingan penerapan PSAK dan *IFRS*

Konsolidasi laporan keuangan menjadi salah satu isu yang sering diperbandingkan antara PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan *IFRS* (*International Financial Reporting Standards*). PT Astra Agro Lestari Tbk, sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia, telah mengadopsi standar ini dengan memodifikasi regulasi lokal (PSAK) dengan merujuk pada *IFRS*. Angka kunci pertama konsolidasi pada umumnya adalah:

1. Definisi Pengendalian

   PSAK: Merujuk pada PSAK 65, "pengendalian" didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengendalikan entitas lainnya, eksposur atau hak imbalan variabel dari partisipasi di entitas tersebut, dan kemampuan untuk mengharapkan balasan tersebut melalui bobot yang dipegang.

   IFRS: Definisi dalam *IFRS* 10 tidak berbeda dengan Paket Sewa PSAK 65, karena paket ini mengadopsi *IFRS* dalam keseluruhannya. Namun, dalam praktik, penerapannya di lapangan sering kali memperhatikan kondisi setempat yang berupa hukum perusahaan yang berpengaruh kepada definisi penguasaan serta hubungan antar entitas.

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 10 no. 6 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

2. Pengukuran Kepentingan Non-Pengendali (KNP)
   PSAK: Menyediakan keleluasaan antara metode nilai wajar dan bagian proporsional dari net assets of the subsidiaries untuk mengukur KNP.
   IFRS: Sama seperti PSAK, *IFRS* 10 pun demikian memberikan izin kedua-dua kaedah tersebut.
3. Transaksi dengan Pemegang Saham Non-Pengendali
   PSAK: Perubahan kepemilikan yang tidak mengakibatkan kehilangan kontrol diperlakukan sebagai transaksi ekuitas, termasuk hasil laba dan rugi.
   IFRS: Sama dengan PSAK karena prinsip dalam hal ini merujuk pada *IFRS* 10.
4. Entitas Berstruktur Khusus (Special Purpose Entities, SPE)
   PSAK: SPE dalam praktik sering kali tunduk pada pengungkapan dan perlakuan yang cukup elastis dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
   IFRS: Dalam ketidakadaan eksklusi praktik geografi atau pasar, *IFRS* 10 menuntut konsolidasi SPE jika kontrol horizontal ada.

Implementasi oleh PT Astra Agro Lestari Tbk

1. Konsolidasi Entitas Anak
   PT Astra Agro Lestari Tbk menerapkan konsolidasi anak perusahaan sesuai dengan PSAK 65, yang mengacu pada *IFRS* 10. Kontrol yang dilakukan oleh perusahaan induk terhadap anak perusahaan dinilai berdasarkan kemampuan induk untuk mempengaruhi kebijakan keuangan dan operasional anak perusahaan untuk keuntungan ekonomi.
2. Pengakuan KNP
   Dalam laporan keuangan, pemilik anak perusahaan, Astra Agro Lestari menggunakan metode proporsional untuk mengukur KNP. Ini sejalan dengan opsi yang tersedia dalam PSAK 65 dan *IFRS* 10.
3. Pengungkapan SPE
   Pengungkapan mengenai entitas tujuan khusus diatur sesuai dengan ketentuan PSAK sesuai kebutuhan, tetapi lebih mengantisipasi relevansi dan persyaratan hukum di Indonesia. Sementara *IFRS* menjadi lebih ketat dalam pendekatan substantif untuk konsolidasi SPEs, PSAK memungkinkan fleksibilitas operasional tertentu.

Pada konsolidasi laporan keuangan, tampaknya ada interrelasi prinsip antara PSAK dan *IFRS* tetapi dalam kasus Pragati Agro Lestari, ada faktor penyesuaian lokal seperti pada perlakuan SPEs, dan regulasi nasional yang berbeda saling mempengaruhi. Niat dari penyesuaian ini adalah untuk menyesuaikan laporan akuntansi dengan pemangku kepentingan domestik sambil mempertahankan standar internasional.

Dampak Perbedaan Penerapan PSAK dan *IFRS*

Dalam dunia akuntansi, penerapan standar akuntansi yang konsisten dan transparan sangat penting untuk memastikan pelaporan keuangan yang andal dan memberikan informasi yang akurat kepada pemangku kepentingan. Standar akuntansi yang digunakan di Indonesia adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Di sisi lain, Standar Pelaporan Keuangan Internasional (*IFRS*) adalah standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) dan diadopsi oleh banyak negara di dunia. Meskipun sebagian besar negara besar telah mengadopsi *IFRS*, Indonesia masih menggunakan PSAK yang mengacu pada *IFRS*. Meski keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan, namun terdapat beberapa perbedaan antara PSAK dan *IFRS* yang mungkin berdampak pada penerapannya terhadap pelaporan keuangan di Indonesia.

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 10 no. 6 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Perbedaan Utama Antara PSAK dan *IFRS*

1. Pengaturan dan Struktur Standar

   Meskipun PSAK mengacu pada *IFRS*, namun keduanya tidak persis sama. Beberapa ketentuan dalam PSAK mungkin lebih sesuai dengan konteks Indonesia baik dari sudut pandang ekonomi maupun hukum. Misalnya, PSAK telah mengadopsi *IFRS* dengan penyesuaian tertentu untuk mencerminkan karakteristik pasar dan peraturan daerah. Perbedaan ini memungkinkan standar akuntansi Indonesia untuk lebih memenuhi kebutuhan dan peraturan setempat, meskipun standar tersebut tidak sepenuhnya mematuhi *IFRS*.

2. Tanggal Penerapan

   Dalam beberapa kasus, Indonesia mungkin mengalami keterlambatan dalam menerapkan amandemen terbaru *IFRS*. Akibatnya, PSAK akan lebih lambat dalam mengadopsi beberapa perubahan terkini dibandingkan negara yang sudah sepenuhnya mengadopsi *IFRS*. Perbedaan waktu implementasi ini dapat berdampak pada konsistensi pelaporan keuangan antara perusahaan Indonesia dan perusahaan yang beroperasi di negara-negara yang hanya menjalankan *IFRS*.

3. Penerapan Nilai Wajar (Fair Value)

   Untuk beberapa aspek akuntansi, *IFRS* cenderung menggunakan pendekatan nilai wajar, sedangkan PSAK lebih menyukai pendekatan nilai historis atau biaya. Misalnya, *IFRS* memprioritaskan nilai wajar instrumen keuangan saat mencatat aset dan liabilitas, sedangkan PSAK memberikan cakupan yang lebih luas dalam penggunaan biaya historis. Perbedaan ini dapat mengakibatkan perbedaan pelaporan laba dan aset karena perhitungan nilai wajar dapat mengakibatkan fluktuasi laporan keuangan yang lebih besar.

4. Perbedaan dalam Pengakuan dan Pengukuran Laba

   Terdapat perbedaan antara PSAK dan *IFRS* dalam pengakuan dan pengukuran laba, khususnya dalam pengukuran liabilitas dan aset yang tidak secara langsung tercermin dalam laporan laba rugi. Misalnya, PSAK 24 tentang 'Imbalan Kerja' memberikan panduan yang sedikit berbeda mengenai pengakuan dan pengukuran kewajiban imbalan kerja dibandingkan dengan IAS 19 yang lebih kompleks. Hal ini dapat mempengaruhi cara perusahaan melaporkan kewajiban pensiun dan imbalan kerja lainnya dalam laporan keuangannya.

Dampak Perbedaan Penerapan PSAK dan *IFRS*

1. Transparansi dan Perbandingan Laporan Keuangan

   Perbedaan penerapan PSAK dan *IFRS* dapat menurunkan tingkat transparansi pelaporan keuangan bagi pemangku kepentingan domestik dan internasional. Perusahaan yang terdaftar di bursa internasional dapat memperoleh manfaat lebih lanjut dengan mengadopsi *IFRS*, karena laporan keuangannya akan lebih mudah dipahami oleh investor asing. Sebaliknya, perusahaan yang hanya menggunakan PSAK mungkin menghadapi tantangan jika dibandingkan secara langsung dengan perusahaan internasional yang menerapkan *IFRS*, karena perbedaan metode akuntansi dapat mengakibatkan perbedaan angka yang disajikan.

2. Biaya Transisi dan Implementasi

   Penerapan standar akuntansi baru sering kali memerlukan biaya yang signifikan, terutama bagi perusahaan yang perlu menyesuaikan sistem pelaporannya dengan standar baru. Perusahaan yang menerapkan PSAK akan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam transisi ke *IFRS* karena perbedaan penilaian aset, liabilitas, dan pengakuan pendapatan. Biaya pelatihan, pembaruan sistem informasi akuntansi, dan pengujian kepatuhan dapat sangat membebani, terutama bagi usaha kecil dan menengah dengan sumber daya terbatas.

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 10 no. 6 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

3. Pengaruh terhadap Laporan Keuangan dan Kinerja Perusahaan

Perbedaan pengakuan pendapatan, penilaian aset, dan liabilitas dapat berdampak pada kinerja keuangan perusahaan sebagaimana tercermin dalam laporan laba rugi dan neraca. Misalnya, jika suatu perusahaan menggunakan nilai wajar untuk menilai aset dan liabilitas (berdasarkan *IFRS*), perubahan harga pasar dapat mempengaruhi jumlah laba yang dilaporkan, dan PSAK tersebut dapat bervariasi secara signifikan dibandingkan dengan perusahaan yang Anda gunakan. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi pemangku kepentingan dalam membandingkan laporan keuangan perusahaan.

4. Dampak terhadap Perusahaan Multinasional

Bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di negara berbeda, perbedaan penerapan PSAK dan *IFRS* dapat mempersulit konsolidasi pelaporan keuangan. Jika suatu perusahaan beroperasi di negara yang telah sepenuhnya mengadopsi *IFRS*, maka perusahaan tersebut mungkin perlu merekonsiliasi laporan keuangan yang disusun sesuai PSAK dengan standar yang berlaku di negara tempatnya beroperasi. Proses rekonsiliasi ini memerlukan waktu, tenaga, dan sumber daya yang signifikan, sehingga dapat mengurangi efisiensi pelaporan keuangan dan meningkatkan biaya administrasi.

5. Risiko Regulasi dan Kepatuhan

Sebagai negara berkembang secara ekonomi, Indonesia terus berupaya untuk mendekatkan penerapan PPEK dengan standar internasional.Namun perbedaan dengan *IFRS* dapat menimbulkan risiko kepatuhan, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di luar negeri atau perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia. Regulasi dan pengawasan oleh regulator akuntansi internasional mungkin memerlukan penyesuaian lebih lanjut terhadap standar yang ada, sehingga jika penerapan PSAK tidak segera diselaraskan dengan *IFRS*, maka terdapat risiko ketidakpatuhan atau ketidakpatuhan terhadap standar internasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas penerapan prinsip-prinsip dasar konsolidasi laporan keuangan pada perusahaan grup di Indonesia, khususnya dengan membandingkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) dan *International Financial Reporting Standards* (*IFRS*). Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun PSAK telah banyak mengadopsi *IFRS*, terdapat beberapa perbedaan penting dalam penerapan konsolidasi laporan keuangan.Penerapan standar PSAK yang telah diharmonisasikan dengan *IFRS* di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan transparansi, kualitas, serta keterbandingan laporan keuangan perusahaan di tingkat internasional. Namun, perbedaan tetap ada terkait dengan pengukuran aset, pengakuan kepentingan non-pengendali, dan metode akuisisi yang disesuaikan dengan kondisi lokal.

Studi kasus yang dilakukan pada PT Astra Agro Lestari Tbk menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia telah berupaya mengikuti ketentuan PSAK 65 yang diadaptasi dari *IFRS* 10. Ini mencakup pengakuan *goodwill*, eliminasi transaksi antar perusahaan, dan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Namun, fleksibilitas yang diberikan oleh PSAK dalam beberapa aspek memungkinkan perusahaan menyesuaikan pelaporan dengan kebutuhan lokal tanpa sepenuhnya mengadopsi ketentuan *IFRS*. Secara keseluruhan, penelitian ini menyarankan perlunya pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan antara PSAK dan *IFRS* agar perusahaan di Indonesia dapat mencapai keseragaman dalam pelaporan keuangan, terutama untuk menarik investor asing dan meningkatkan kepercayaan di pasar global. Selain itu, otoritas

regulasi di Indonesia disarankan untuk terus memperbarui standar akuntansi nasional agar lebih sejalan dengan standar internasional guna mendukung integrasi ekonomi global.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, A., Khotimah, M. C., Putri, M. E., & Panggiarti, E. K. (2023). Analisis Perbedaan PSAK 22 dan *IFRS* 3 Tentang Kombinasi Bisnis Pada Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Pada Perusahaan di Indonesia. Jurnal Akuntan Publik, 1(4), 282-290.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2021). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 65: Laporan Keuangan Konsolidasian. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Hidayat, S., & Kurniawan, A. (2018). "Pengaruh Implementasi PSAK terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan di Indonesia." Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 23(1), 55-69.

https://www.idx.co.id/Perusahaan-Tercatat/Laporan-Keuangan-Dan-Tahunan/

Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). PSAK No. 65: Laporan Keuangan Konsolidasi. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

International Accounting Standards Board. (2011). IFRS 10: Consolidated Financial Statements. London: IFRS Foundation.

Irawati, Tri, and Sri Harjanto. "Perancangan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi." Jurnal Ilmiah SINUS 12.1 (2014).

Kamaluddin, A., & Abdul Manan, A. (2019). Konsolidasi Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK. Bandung: Alfabeta.

Martani, D., Hidayat, T., Ningrum, A. S., & Maulana, T. I. (2017). Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Salemba Empat. Jakarta.

Maulana, J., & Satria, M. R. (2021). Analisis Dampak Penerapan PSAK 73 Atas Sewa Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Jasa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019. Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan, 9(2), 169-178.

Purba, D. S., Rachmawati, D. W., Sari, I. R., SE, M. A., Prawitasari, P. P., Mohammad Yamin, S. E., ... & Suseno, S. E. (2024). AKUNTANSI LANJUTAN. Cendikia Mulia Mandiri.

Purnamasari, D., & Suryadi, Y. (2020). "Analisis Perbandingan PSAK dan IFRS dalam Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian." Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 17(2), 101-114.

Rohma, M., & Afendi, D. (2023). Implementasi PSAK 65 pada Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom Indonesia Tbk dan Entitas Anak. JUMBA (Jurnal Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi), 2(1), 53-62.

Rudianto. (2013). Akuntansi Keuangan Menengah: Berdasarkan PSAK Berbasis IFRS. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Septriana, I., Prajanto, A., & Pamungkas, I. D. (2023). Akuntansi Keuangan Lanjutan (Jilid 1). Penerbit NEM.

Setiawan, D. (2016). PENERAPAN PSAK 65 SERTA RELEVANSI PSAK 15 DAN 22 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI. AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA, 7(3), 80-89.

Siregar, R. (2017). Akuntansi Keuangan Lanjutan I.

Sriyanto, Yuanne Gabrila, Pingky Nila Primasari, and Endang Kartini Panggiarti. "Laporan Konsolidasi dan Laporan Keuangan Tersendiri Berdasarkan PSAK." Akuntansi 2.2 (2023): 224-232.

Sugita, D. (2019). Dampak penerapan PSAK 4 (revisi 1994) dan PSAK 4 (revisi 2009) terhadap laporan keuangan konsolidasian perusahaan.

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 10 no. 6 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Suwardjono. (2014). Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Yogyakarta: BPFE.Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2020). Sosialisasi PSAK: Penerapan IFRS di Indonesia. Jakarta: IAI.

TANJUNG, Riani; SIHITE, Rachel Erlita Anggrey Rani. Analisis Implementasi PSAK No. 1 Pada Laporan Keuangan PT. Angkasa PuraA II. Jurnal Akuntansi, 2024, 19.01: 50-63.

Tarigan, J., & Putri, M. (2021). "Adaptasi PSAK terhadap Standar Internasional: Tantangan dan Peluang." Jurnal Akuntansi Indonesia, 26(3), 197-210.

Wahyudi, D. (2017). Harmonisasi Standar Akuntansi Indonesia dengan IFRS: Implikasi dan Perkembangannya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Witjaksono,A.,Ariyanto,S.,&Lesmana, T.(2014).Analisis dampak PSAK 24 tahun 2013. Jurnal GICI, 4(3),1-8.